



KONI Kota Siapkan Dua Langkah Hukum

● Terkait 9 Atletnya Dilarang Tampil di Porda DIY

YOGYA, TRIBUN - KONI Kota Yogyakarta berencana menempuh jalur hukum, sekaligus menggelar aksi damai menyikapi keputusan KONI DIY yang mencoret sembilan atletnya, yang diproyeksi tampil di Pekan Olahraga Daerah (Porda) DIY 2019. Dua opsi tersebut bakal diambil, lantaran permohonan KONI Kota untuk menggelar audiensi dengan Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) DIY, tak mendapat restu.

KONI DIY akhirnya menolak, karena keputusan dianggap telah final. Ketua Umum (Ketum) KONI Kota Yogyakarta, Tri Joko Susanto mengatakan, pihaknya sudah mendiskusikan dua langkah yang bakal diambil itu, bersama sembilan atlet yang dinyatakan gagal lolos verifikasi, orang tua atlet, hingga pengurus cabang olahraga (cabor).

"Kami sudah menerima surat jawaban KONI DIY, yang memastikan mereka menolak permohonan

kami. Sehingga, tak ada jalan dialog untuk menjelaskan bukti-bukti kami. Jadi, muncul dua opsi itu," tandasnya, Rabu (17/7).

Menurut Tri Joko, dengan ditolaknya permohonan itu, upaya yang ditempuh pun telah mentok. Karenanya, ia tak bisa lagi membendung kehendak atlet maupun orang tua atlet, yang ingin mempertanyakan nasib mereka di Porda DIY 2019 kepada pihak-pihak terkait.

"Kami belum tahu, atlet-atlet ini akan menggelar aksi damai di mana. Yang jelas mereka ingin mengadakan nasib sebagai atlet DIY dan berdomisili di DIY, tapi tak bisa bertanding di Porda besok," cetusnya.

"Bisa jadi, aksi damai nanti akan digelar di KONI DIY, bisa ke DPRD DIY, atau bisa juga ke Gubernur DIY, sebagai pemangku kebijakan di DIY," imbuh Tri Joko.

Wakil Ketua Umum II KONI Kota Yogyakarta, Bastari Ilyas menambahkan, selain aksi damai, pihaknya pun mem-

buka peluang untuk menyerang polemik ini menuju meja hijau. Menurutnya, hal ini harus dilakukan demi kepentingan atlet yang berambisi mengejar prestasi.

"Kami siap mendampingi para atlet untuk menggugat putusan KONI DIY, yang menggunakan landasan atas keputusan BAORI DIY atau BAORDA ini ke pengadilan umum. Jadi, bukan ke PTUN," tegasnya.

Pihaknya berkomitmen memperjuangkan nasib atlet, yang dinilai merugikan dan mengancam masa depan karier mereka. Terlebih, mereka sejatinya sudah memenuhi syarat, dengan menjadi warga DIY, serta berdomisili lebih dari satu tahun, demi tampil pada gelaran Porda DIY 2019 mendatang.

"Porda DIY itu azasnya adalah domisili. Kalau sudah terpenuhi, ya sudah, berarti sah. Kami perjuangkan ini demi kepentingan jangka panjang untuk DIY, bukan hanya untuk Kota Yogyakarta," tandasnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemuda dan Olahraga	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005